



LKIP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perkebunan Tahun 2024



**PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS PERKEBUNAN
JL. JENDERAL SOEDIRMAN NO. 18, 73112**

IKHTISAR EKSEKUTIF

Perkebunan merupakan salah satu sub sector strategis yang secara ekonomis, ekologis, dan sosial budaya memainkan peranan penting dalam pembangunan nasional. Sesuai undang – undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, secara ekonomi perkebunan berfungsi meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat serta penguatan struktur ekonomi wilayah dan nasional; secara ekologi berfungsi meningkatkan konversi tanah dan air, penyerap karbon, penyedia oksigen dan penyangga kawasan lindung serta secara sosial budaya berfungsi sebagai perekat dan pemersatu bangsa.

Tujuan Renstra Dinas Perkebunan adalah mewujudkan sektor perkebunan yang produktif, bernilai tambah, berdaya saing, dan berkelanjutan” untuk mencapainya maka disusunlah perangkat perencanaan yang memuat tujuan, sasaran, strategi pencapaiannya dan arah kebijakan yang ujung muaranya kepada perumusan program dan kegiatan di lapangan.

Pengukuran pencapaian kinerja Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah dilakukan dengan membandingkan antara rencana kinerja (Performance plan) yang diinginkan dengan realisasi kinerja (Performance Result) yang dicapai oleh organisasi yang bersangkutan. Hasil pengukuran ini bermanfaat untuk memberikan gambaran kepada pihak-pihak eksternal tentang pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan untuk mewujudkan sasaran kinerja melalui indikator-indikator yang telah ditetapkan. Bila terjadi perbedaan antara rencana kinerja dengan realisasinya maka harus dilakukan evaluasi mendalam guna mencari penyebabnya dan menentukan strategi untuk mengatasi masalah tersebut.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah ini menyajikan hasil pengukuran, evaluasi dan analisis pencapaian sebagai berikut:

1. 2024 merupakan tahun ke 3 (tiga) dalam penilaian kinerja selama periode Rencana Strategis (Renstra) 2021-2026 dari 3 sasaran yang telah ditetapkan di dalam Rencana Strategis (Renstra) ditahun berjalan, pengukuran, evaluasi dan analisis capaian sasaran strategis pada tahun 2024 telah dapat direalisasikan dengan baik. Keberhasilan pencapaian sasaran ini tidak terlepas dari komitmen penuh dari PLt.Kepala Dinas dan jajarannya serta staf Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah di samping adanya koordinasi dan sinergi dengan pihak terkait.
2. Keberhasilan dan kekurangan yang telah dicapai selama tahun 2024 akan menjadi tolak ukur untuk mengoptimalkan capaian kinerja di tahun mendatang dan difokuskan pada peningkatan persentase indikator-indikator yang sudah ditetapkan.

KATA PENGANTAR



Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas Karunia-Nya, kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah SKPD Tahun 2024 merupakan bentuk komitmen nyata Dinas Perkebunan dalam mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang baik sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Penetapan Kinerja dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) adalah wujud pertanggungjawaban pejabat publik kepada masyarakat tentang kinerja lembaga pemerintah selama satu tahun anggaran. Proses kinerja Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah telah diukur, dievaluasi, dianalisis dan dijabarkan dalam bentuk LKIP. Adapun tujuan penyusunan LKIP adalah untuk menggambarkan penerapan Rencana Strategis (Renstra) dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi di masing-masing perangkat daerah, serta keberhasilan capaian sasaran saat ini untuk percepatan dalam meningkatkan kualitas capaian kinerja yang diharapkan pada tahun yang akan datang. Dalam Renstra 2021–2026 Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah memiliki beberapa tujuan antara lain meningkatkan produktivitas komoditi perkebunan melalui penyusunan Laporan Kinerja ini kami sampaikan proses bagaimana cara mencapai tujuan-tujuan tersebut.

Demikian LKIP ini kami susun semoga dapat digunakan sebagai bahan bagi pihak-pihak yang berkepentingan khususnya untuk peningkatan kinerja dimasa mendatang

Palangka Raya, Januari 2025
Kepala Dinas Perkebunan
Provinsi Kalimantan Tengah,



H. RIZKY RAMADHANA BADJURI, ST., M.T
Pembina Tingkat I
NIP. 19780801 200604 1 002

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR	
IKHTISAR EKSEKUTIF	
DAFTAR ISI	
DAFTAR TABEL	
DAFTAR GRAFIK	
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.1.1 Potensi Perkebunan	2
1.1.2 Kewenangan Dinas Perkebunan Provinsi	2
1.1.3. Struktur Organisasi	3
1.1.4. Data Aparatur Sipil Negara (ASN) Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah.....	4
1.1.5 Pencapaian Anggaran Tahun 2024	7
1.1.6 Dasar Hukum	11
BAB II PERENCANAAN KINERJA	
2.1 Tujuan dan Sasaran.....	12
2.1.1. Tujuan	12
2.1.2. Sasaran.....	13
2.2 Strategi	16
2.3 Anggaran	20
2.4 Penetapan Indikator Kinerja Utama	20
2.5 Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2024.....	20
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
3.1 Analisis Capaian Kinerja Tahun 2024	21
3.2 Analisis Hasil Pengukuran Kinerja	22
BAB IV PENUTUP	
4.1. Kesimpulan dan Saran.....	33
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

	Hal
1. Tabel 1 Luas dan produksi tanaman perkebunan rakyat	2
2. Tabel 2 Pencapaian Anggaran Pendapatan Belanja Daerah SKPD Tahun 2024	7
3. Tabel 3 Pencapaian Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) Tahun 2024.....	10
4. Tabel 4 Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun 2024.....	11
5. Tabel 5 Tujuan, Sasaran jangka menengah perangkat daerah	15
6. Tabel 6 Arah Kebijakan Jangka Menengah Perangkat Daerah	18
7. Tabel 7 Capaian Kinerja Tahun 2024.....	21
8. Tabel 8 Indikator, Target dan Realisasi Sasaran 1	22
9. Tabel 9 Rekapitulasi Produksi laju produksi komoditi unggulan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024	23
10. Tabel 10 Data Rekapitulasi Gangguan Usaha dan Konflik dan Konflik Perkebunan di Kalimantan Tengah Periode Bulan Januari s/d Desember Tahun 2024	24
11. Tabel 11 Rekapitulasi Pemantauan Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Komoditi Perkebunan (Kelapa Sawit, Karet, Kelapa, Kopi, Kakao dan Lada) Tahun 2024	26
12. Tabel 12 Indikator, Target dan Realisasi Sasaran 2	27
13. Tabel 13 Rekapitulasi Unit Pengolahan Dan Pemasaran Bokar Bersih (UPPB) se-Kalimantan Tengah Tahun 2024	28
14. Tabel 14 Nilai Tukar Petani (NTP) Subsektor Perkebunan (2018=100) Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2022-2024.	29
15. Tabel 15 Indikator, Target dan Realisasi Sasaran 3	30
16. Tabel 16 Rekapitulasi jumlah perusahaan swasta di Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024.....	31
17. Tabel 17 Rekapitulasi jumlah Surat Tanda Daftar Budidaya di Kalimantan Tengah Tahun 2024	32
18. Tabel 18 Kontribusi PDRB Sub kategori Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah 2022-2024.....	32

DAFTAR GRAFIK

	Hal
1. Grafik 1 Perbandingan Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) Laki – laki dan Perempuan	5
2. Grafik 2 Jumlah Aparatur Sipil Negara Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024 berdasarkan Jenis Pendidikan	5
3. Grafik 3 Perbandingan Aparatur Sipil Negara berdasarkan Golongan	6
4. Grafik 4 Perbandingan Aparatur Sipil Negara berdasarkan status kepegawaian	6

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkebunan merupakan salah satu sub sektor strategis yang secara ekonomis, ekologis, dan sosial budaya memainkan peranan penting dalam pembangunan nasional. Sesuai Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, secara ekonomi perkebunan berfungsi meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat serta penguatan struktur ekonomi wilayah dan nasional; secara ekologi berfungsi meningkatkan konservasi tanah dan air, penyerap karbon, penyedia oksigen dan penyangga kawasan lindung serta secara sosial budaya berfungsi sebagai perekat dan pemersatu bangsa.

Dalam dokumen renstra tahun 2021-2026 Dinas Perkebunan mempunyai 3 (tiga) sasaran yaitu : 1).Peningkatan produktivitas komoditas perkebunan, 2). Peningkatan nilai tambah dan daya saing komoditas perkebunan, 3). Tercapainya pengelolaan perkebunan berkelanjutan, dan 5 (lima) strategi dalam pencapaian target yang sudah ditentukan antara lain : 1). Fokus melaksanakan program intensifikasi dan peremajaan tanaman pada lahan yang tersedia untuk meningkatkan produktivitas komoditas perkebunan, 2.) Mendorong pemanfaatan teknologi tepat guna dan standarisasi untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing komoditas perkebunan, 3.) Memenuhi kekurangan ketersediaan sarana dan prasarana pembangunan perkebunan sesuai kebutuhan, 4.) Meningkatkan kualitas kelembagaan dan tata kelola perkebunan melalui dukungan kebijakan dan peningkatan kapasitas, 5.)Meningkatkan kesejahteraan petani/kebun melalui dukungan kebijakan dan peningkatan kapasitas.

Dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas program pendayagunaan aparatur, serta agar mampu eksis dan unggul dalam lingkungan yang berubah sangat cepat dewasa ini, maka Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah sebagai suatu organisasi terus menerus melakukan perubahan kearah perbaikan. Perubahan tersebut disusun dalam suatu tahapan yang konsisten dan berkelanjutan, guna meningkatkan akuntabilitas dan kinerja yang berorientasi kepada pencapaian hasil.

1.1.1 Potensi Perkebunan

Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah dalam dokumen Renstra Tahun 2021 – 2026 mencoba untuk mengembangkan 5 (lima) komoditi yaitu Kelapa Sawit, Karet, Kelapa Dalam, Kopi dan Kakao. Adapun komoditi unggulan adalah Kelapa Sawit, Karet, dan Kelapa Dalam. Dalam perencanaannya diperkirakan luas pengembangan sampai dengan Tahun 2025 adalah 2.277.004,01Ha

Tabel 1. Luas dan produksi tanaman perkebunan rakyat

Jenis Komoditi	Kelas Tanaman			Total Luas (Ha)	Total Produksi	Produktivitas (Kg/Ha)
	TBM (Ha)	TM (Ha)	TTM/TR (Ha)			
Kelapa Sawit	91.924,97	302.407,60	6.605,19	400.937,76	1.052.198,19	3.479,40
Karet	127.294,73	278.825,03	20.624,92	426.744,68	174.687,55	626,51
Kelapa Dalam	8.393,12	27.142,64	1.403,06	36.938,82	16.668,26	614,10
Kopi	958,82	450,31	729,61	2.138,74	233,19	517,84
Kakao	1.162,96	1.784,36	207,05	3.154,37	1.585,18	888,37

Angka Sementara Statistik Perkebunan 2024

Keterangan :

TBM = Tanaman Belum Menghasilkan

TM = Tanaman Mati

TTM/TR = Tanaman Rusak

1.1.2. Kewenangan Dinas Perkebunan Provinsi

Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 37 Tahun 2022 tanggal 01 November Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Dinas Perkebunan mempunyai tugas membantu Gubernur dalam melaksanakan kewenangan desentralisasi dan dekonsentrasi di bidang Perkebunan sesuai dengan Kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan:

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut di atas, Dinas Perkebunan menyelenggarakan fungsi :

1. Perumusan kebijakan dasar dan kebijakan teknis di bidang perkebunan sesuai kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan;
2. Pembuatan dan mengusulkan rencana anggaran penyelenggaraan pembangunan perkebunan daerah serta pemanfaatan sumber dana non fiskal untuk pengembangan investasi usaha perkebunan;
3. Pengkoordinasian, integrasi, sinkronisasi dan harmonisasi penyelenggaraan pembangunan perkebunan daerah;
4. Pembinaan, pelayanan, pengawasan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan kegiatan dan anggaran perkebunan daerah;
5. Pembinaan pemanfaatan kebun
6. Pengawasan hasil perkebunan;
7. Penyelenggaraan pengembangan dan perlindungan perkebunan;
8. Pembinaan usaha perkebunan;
9. Penyelenggaraan urusan kesekretariatan; dan
10. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1.1.3. Struktur Organisasi

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, susunan organisasi Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah terdiri dari :

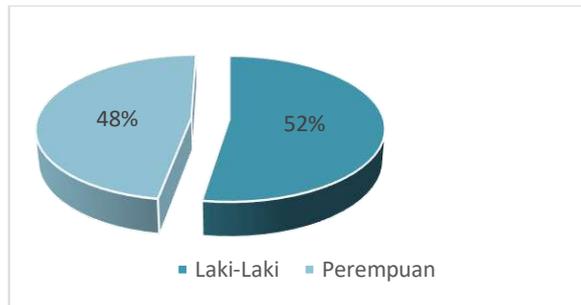
- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat terdiri atas:
 1. Sub Bagian Umum Kepegawaian; dan
 2. Sub Bagian Keuangan dan Aset;
- c. Bidang Perlindungan Perkebunan;
- d. Bidang Perbenihan dan Budidaya;
- e. Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan;
- f. Bidang Pembinaan Usaha, Pemberdayaan Kelembagaan dan Pengembangan Potensi Perkebunan;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- h. Unit Pelaksana Teknis.

a. Berdasarkan jenis kelamin :

Laki – laki : 42 Orang

Perempuan : 38 Orang

Grafik 1. Perbandingan Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) Laki – laki dan Perempuan



b. Berdasarkan jenis pendidikan

Pasca Sarjana (S2) : 11 Orang

Sarjana (S1) : 47 Orang

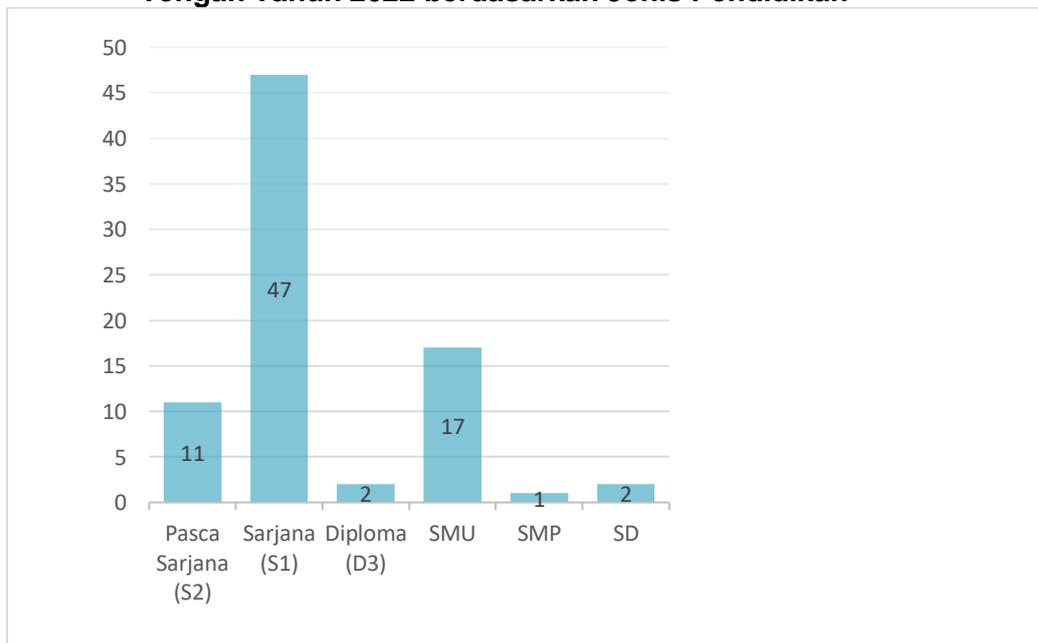
Diploma (D3) : 2 Orang

SMU : 17 Orang

SMP : 1 Orang

SD : 2 Orang

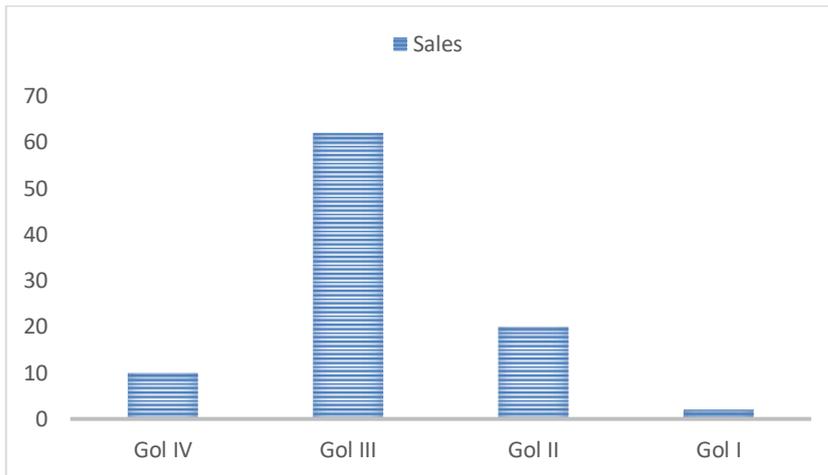
Grafik 2. Jumlah Aparatur Sipil Negara Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2022 berdasarkan Jenis Pendidikan



c. Berdasarkan jenis golongan

Golongan 4 : 10 Orang
Golongan 3 : 57 Orang
Golongan 2 : 10 Orang
Golongan 1 : 3 Orang

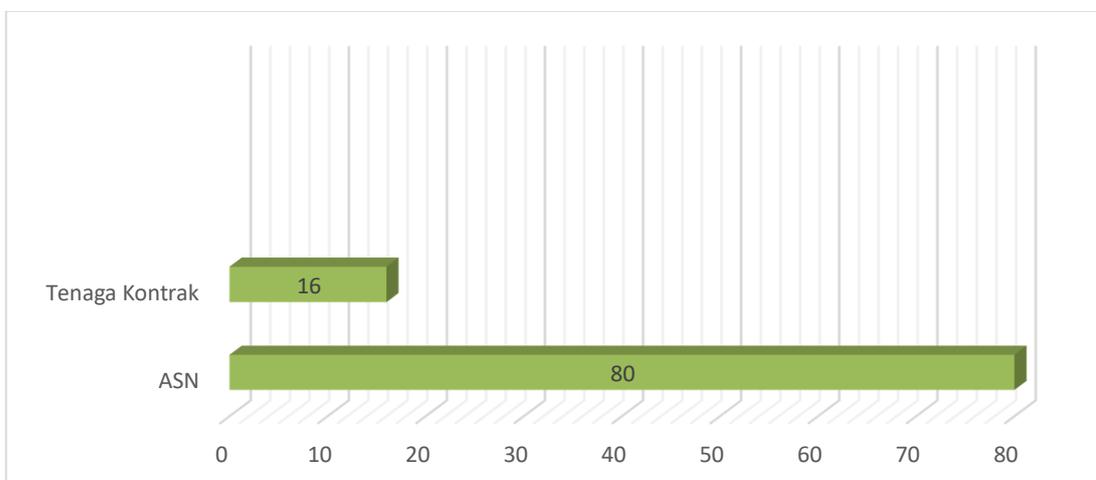
Grafik 3. Perbandingan Aparatur Sipil Negara berdasarkan Golongan



c. Berdasarkan status kepegawaian

ASN : 80 Orang
Tenaga Kontrak : 16 Orang

Grafik 4. Perbandingan Aparatur Sipil Negara berdasarkan status kepegawaian



1.1.5 Pencapaian Anggaran Tahun 2024

A. Realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD)

Dana APBD Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024 sebesar Rp. 18.782.691.309 (45,57%) untuk Belanja Operasi Rp.18.584.091.309 (45,08%) sedangkan untuk Belanja Modal sebesar Rp. 198.600.000 (0,48%).

Tabel 2. Pencapaian Anggaran Pendapatan Belanja Daerah SKPD Tahun 2024

NO	KEGIATAN	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	REALISASI (%)	
				KEUANGAN	FISIK
1	2	3	4	5	6
I	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN				
	Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	299.745.860	263.917.774	29,42	
	Pengawasan Sebaran Pupuk Pestisida Alsintan dan Sarana Pendukung Pertanian	242.425.945	206.767.774	88,05	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	57.319.915	57.150.000	85,29	
	Pengawasan Mutu Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	1.675.005.828	316.972.560	99,70	
	Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih	46.792.453	46.117.202	18,92	
	Perbanyak Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Anakan	1.628.213.375	270.855.358	98,56	
II	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN				
	Penataan Prasarana Pertanian	20.432.128.494	2.829.465.010	13,85	
	Perencanaan Pengembangan Prasarana Kawasan dan Komoditas Pertanian	9.693.959.200	2.384.580.359	13,85	
	Koordinasi Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	8.256.953.015	16.260.000	24,60	
	Pembangunan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya	2.466.216.279	416.920.651	0,20	
	Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pasca Panen Perkebunan	15.000.000	11.704.000	16,91	
III	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN			93,73	
	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi	624.521.807	585.359.728	93,73	
	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan	131.960.898	129.912.338	98,45	
	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan	28.111.110	26.390.000	93,88	
	Pencegahan Penanganan Kebakaran Lahan dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan	464.449.799	429.057.390	92,38	

NO	KEGIATAN	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	REALISASI (%)	
				KEUANGAN	FISIK
1	2	3	4	5	6
IV	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN				
	Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	640.898.200	219.076.000		34,18
	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian	640.898.200	219.076.000	34,18	
	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN				
	Pengembangan Kelembagaan Penyuluhan Pertanian	52.270.835	46.997.225	89,91	
	Penguatan Kelembagaan Penyuluhan Pertanian	52.270.835	46.997.225	89,91	
	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan	62.962.499	46.931.559	74,54	
	Pendampingan Manajemen Koorporasi Petani	54.962.499	46.931.559	85,39	
	Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Korporasi Petani	8.000.000	0	0,00	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				
	Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	169.179.524	114.104.310	83,03	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	104.410.000	50.790.130	67,45	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	5.000.000	4.969.000	48,64	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	5.000.000	4.969.000	99,38	
	Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD	5.000.000	4.969.000	99,38	
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD	5.000.000	4.969.000	99,38	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	15.160.254	14.603.180	99,38	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	29.609.270	28.835.000	96,33	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	14.270.050.121	12.514.352.516		
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	14.120.761.996	12.365.947.516	87,70	
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	115.000.000	114.888.000	87,57	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	25.536.380	24.766.000	99,90	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	121.340.538	111.366.594	99,99	
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	121.340.538	111.366.594		
	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	72.364.000	57.298.479	91,78	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	72.364.000	57.298.479		
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	666.628.494	500.389.174	79,18	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	15.000.000	0		
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	14.270.050.121	12.514.352.516	75,06	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	266.628.494	167.923.400	0,00	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	60.000.000	40.825.975	62,98	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	55.000.000	40.319.100	68,04	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	20.000.000	17.565.000	73,31	

NO	KEGIATAN	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	REALISASI (%)	
				KEUANGAN	FISIK
1	2	3	4	5	6
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	250.000.000	233.755.699	93,50	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				
	Pengadaan Sarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	137.385.571	113.245.550	82,43	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.766.911.139	876.470.030	82,43	
	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	358.868.948	286.649.268	49,60	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.408.042.191	589.820.762		
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			79,88	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	187.287.000	156.609.800	41,89	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	18.000.000	17.640.000	0,00	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	24.000.000	12.495.000	81,45	

Dinas perkebunan provinsi kalimantan tengah memiliki 6 (enam) program, 15 (lima belas) kegiatan dan 42 (empat puluh dua) sub kegiatan sebagai penunjang pencapaian target pada indikator sasaran. Dalam pelaksanaannya semua kegiatan, mempunyai peranan penting untuk saling mengisi kekurangan dan kelebihan antar kegiatan, sehingga tercapainya target yang telah ditetapkan.

Program I, yaitu **Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** berisi tentang pemenuhan keperluan Dinas dari segi implisit dan eksplisit seperti penganggaran, pemenuhan gaji pegawai dan tenaga kontrak, kelancaran administrasi kantor, pemenuhan kebutuhan data dan publikasi dan lain – lain.

Program II, yaitu **Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian** yang mempunyai fungsi mengidentifikasi pengawasan peredaran sarana pertanian dan peredaran perkebunan di 14 kab./kota.

Program III, yaitu **Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian**, program ini sebagai pendukung penghasilan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui UPT Balai Benih dan Kebun Produksi Tanaman Perkebunan (B2KP).

Program IV, yaitu **Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian** yang bertugas mendata, mengidentifikasi dan memediasi gangguan di bidang perkebunan lingkup pekebun dan perusahaan perkebunan.

Program V, yaitu **Perizinan Usaha Pertanian** yang mempunyai fungsi membina dan menjadi pengawas pada perusahaan besar perkebunan.

Program VI, yaitu **Penyuluhan Pertanian** yang mempunyai fungsi mengidentifikasi dan mendata Koorperasi petani pekebun di Kalimantan Tengah.

B. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2024

Tahun 2024 Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah memiliki 3 (tiga) satuan kerja (satker) Satker Perkebunan Tugas Pembantuan dan Dana Dekonsentrasi serta Satker Prasarana dan Sarana . Pencapaian anggaran Dana APBN bisa dilihat dari table berikut :

Tabel 3. Pencapaian Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) Tahun 2024

NO	KEGIATAN	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	REALISASI (%)	
				KEUANGAN	FISIK
1	2	3	4	5	6
1	SATKERBUN TUGAS PEMBANTUAN (TP)				
	Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	676.740.000.	652.619.408	96,44	100
	Pengembangan Kawasan Tanaman Kelapa Sawit dan Aneka Palma	171.140.000	168.086.000	98,22	100
	Pasca Panen Pengolahan (Hilirisasi) dan Pemasaran Hasil Perkebunan	363.800.000	344.406.008	94,67	100
	Penguatan Perbenihan Tanaman Perkebunan	141.800.000	140.127.400	98,82	100
	Program Dukungan Manajemen				
	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Perkebunan	197.600.000	196.066.648	99,22	100
	Jumlah 1	874.340.000	848.686.056	97,07	100
2	SATKERBUN DEKONSENTRASI (DK)				
	Penguatan Perlindungan Perkebunan	119.900.000	117.190.000	97,74	100
	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Perkebunan	384.400.000	372.736.076	97,47	100
	Jumlah 2	502.300.000	489.926.076	97,54	100
3	SATKER PSP				
	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian	50.000.000	28.656.000	57,31	64
	Jumlah 3	50.000.000	28.656.000	57,31	64
	Jumlah Total 1+2+3				

Satuan kerja Perkebunan dan Prasarana dan Sarana mempunyai fungsi yang melaksanakan kegiatan – kegiatan yang tidak bisa tercover dana APBD Tahun 2024

C. Realisasi PAD

Dinas Perkebunan Kalimantan Tengah memiliki 2 UPTD, yaitu UPT Balai Perlindungan Perkebunan dan Pengawasan Benih (BPPPB) dan UPT Balai Benih dan Kebun Produksi Perkebunan (BBKPP) dimana kedua balai tersebut menjadi salah satu penyumbang terbesar dalam pemenuhan target PAD sebesar Rp.283.044.620,-

Tabel 4. Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun 2024

NO	TARGET (Rp)	REALISASI	
		KEUANGAN (Rp)	%
1	2	3	4
	256.000.000	283.044.620	110,56

1.1.6. Dasar Hukum

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara, dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia telah mengeluarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara, dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia (Permenpan) nomor 53 tahun 2014 tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja, dan tata cara reuiu atas laporan kinerja instansi pemerintah. Petunjuk Teknis Penyusunan LAKIP Berdasarkan Permenpan No 53 Tahun 2014 tersebut menggantikan Permenpan No 29 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah atau LAKIP.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah yang berfungsi sebagai pusat pertanggungjawaban pembangunan daerah dengan dipimpin oleh kepala satuan kerja selaku pengguna anggaran/pengguna barang. Sebagai salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah yang merupakan pelaksana urusan daerah yang diwadahi dalam dinas daerah, maka keberadaan dan peran Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah memegang peran penting. Terlebih, pada saat ini subsektor perkebunan memiliki kontribusi yang signifikan dan stabil di tengah pesatnya perubahan lingkungan strategis. Lebih jauh, kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah menentukan kinerja pada tiap aspek manajemen pembangunan daerah, yang pada gilirannya, menentukan kinerja Daerah dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat di daerah.

Atas dasar hal tersebut, menentukan tujuan dan sasaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Perkebunan menjadi hal penting dan strategis bagi terwujudnya visi dan misi Kepala daerah maupun Wakil Kepala Daerah. Tujuan dalam sebuah dokumen perencanaan strategis Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah merupakan penjabaran visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah. Merupakan target kuantitatif yang akan dicapai atau dihasilkan sekaligus merupakan pencapaian ukuran keberhasilan kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah.

2.1 Tujuan dan Sasaran

2.1.1. Tujuan

Tujuan jangka menengah perangkat daerah Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 2021-2026. Selain itu perumusan

tujuan jangka menengah tetap mempertimbangkan masalah-masalah terkini yang telah diuraikan Bab sebelumnya dengan prioritas pencapaiannya.

Berdasarkan telaah dan penjabaran dari tujuan dari Misi ke 2 Rencana Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Tengah 2005-2025 yaitu “Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindustri dan ketahanan pangan secara berkelanjutan” dan Visi Misi Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian RI yang tertuang di dalam Rencana Strategis 2020-2024 serta telaah KLHS Provinsi Kalimantan Tengah maka diperoleh kata-kata kunci di dalam perumusan tujuan jangka menengah Dinas Perkebunan yaitu:

- Berkelanjutan
- Produktif
- Bernilai tambah dan
- Berdaya saing.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka ditetapkanlah tujuan jangka menengah perangkat daerah Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah adalah “Mewujudkan sektor perkebunan yang produktif, bernilai tambah, berdaya saing, dan berkelanjutan”.

2.1.2 Sasaran

Sasaran jangka menengah perangkat daerah adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program Perangkat Daerah. Sasaran organisasi yang ditetapkan pada dasarnya merupakan bagian dari proses perencanaan dengan fokus utama berupa tindakan dan alokasi sumber daya organisasi dalam rencana kegiatan atau operasional organisasi yang akan dilaksanakan. Seyogyanya penetapan sasaran merupakan peningkatan dari sasaran yang telah dilaksanakan

Untuk mencapai tujuan Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah di atas maka dirumuskan sasaran pembangunan sektor perkebunan untuk jangka waktu 2021-2026 sebagai berikut :

1. Peningkatan produktivitas komoditas perkebunan.
2. Peningkatan nilai tambah dan daya saing komoditas perkebunan.
3. Tercapainya Pengelolaan Perkebunan Berkelanjutan.

Tabel 5. Tujuan, Sasaran jangka menengah perangkat daerah

No.	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-				
					2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Mewujudkan sektor perkebunan yang produktif bernilai tambah, berdaya saing, dan berkelanjutan	Kontribusi Sektor Perkebunan pada PDRB Provinsi	Peningkatan produktivitas komoditas perkebunan	Persentase Laju Pertumbuhan Produksi Komoditas Perkebunan	0,12	0,14	0,16	0,18	0,20
				Persentase Mediasi Gangguan Usaha Perkebunan (GUP)	80%	80%	80%	82%	85%
				Persentase penanganan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT)	70%	75%	80%	82%	85%
			Peningkatan nilai tambah dan daya saing komoditas perkebunan	Jumlah Unit Pengolahan dan Pemasaran Bokar (UPPB)	51	53	55	57	59
				Persentase Peningkatan NTP sub Sektor Perkebunan	0,08	0,08	0,08	0,09	0,09
			Tercapainya pengelolaan perkebunan	Persentase Perusahaan perkebunan Besar yang memperoleh sertifikasi Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO)	50%	55%	55%	60%	60%
				Jumlah Surat Tanda Daftar Budidaya (STDB)	500	500	500	500	500
				Kontribusi sub sektor perkebunan terhadap PDRB (%)	13,96	14,00	14,05	14,10	14,13

Dalam rangka mewujudkan visi, misi dan pelaksanaan program pembangunan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah, Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah telah menetapkan tujuan pembangunan perkebunan Provinsi Kalimantan jangka menengah 2021- 2026. Tujuan tersebut adalah “Mewujudkan sektor perkebunan yang produktif, bernilai tambah, berdaya saing, dan Berkelanjutan” Untuk mencapainya maka disusunlah perangkat perencanaan yang memuat tujuan, sasaran, strategi pencapaiannya dan arah kebijakan yang ujung muaranya kepada perumusan program dan kegiatan di lapangan.

Program merupakan penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi. Sedangkan Kegiatan Perangkat Daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam rangka mencapai hasil (*outcome*) suatu program. Dalam konteks sub sektor perkebunan Kalimantan Tengah, keluaran sekaligus hasil yang diharapkan adalah terwujudnya sektor perkebunan yang produktif dengan komoditas bernilai tambah tinggi serta memiliki daya saing di tengah percaturan pasar global. Tentu saja dalam kerangka kemajuan yang berkeadilan. Berorientasi agribisnis di hulu sekaligus kemajuan agroindustri di hilir. Pada akhirnya semua bermuara pada terwujudnya kesejahteraan masyarakat petani.

2.2 Strategi

Perumusan strategi merupakan hal penting dalam sebuah perencanaan strategis. Strategi merupakan alat untuk tercapainya tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan oleh perangkat daerah. Sekaligus sebagai jembatan yang menghubungkan antara penetapan tujuan dan sasaran dengan pelaksanaan program kegiatan.

Strategi pembangunan jangka menengah dari Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah untuk kurun waktu 2021-2025 adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas

pembangunan daerah untuk mencapai sasaran. Dalam perumusan strategi dengan mempertimbangkan tujuan dan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan, peluang dan ancaman pembangunan sektor perkebunan yang saat ini harus dihadapi serta kekuatan dan kekurangan yang dimiliki oleh internal Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah.

Strategi Pembangunan Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah untuk jangka waktu 2021 – 2026 adalah sebagai berikut:

1. Fokus melaksanakan program intensifikasi dan peremajaan tanaman pada lahan yang tersedia untuk meningkatkan produktivitas komoditas perkebunan.
2. Mendorong pemanfaatan teknologi tepat guna dan standarisasi untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing komoditas perkebunan.
3. Memenuhi kekurangan ketersediaan sarana dan prasarana pembangunan perkebunan sesuai kebutuhan.
4. Meningkatkan kualitas kelembagaan dan tata kelola perkebunan melalui dukungan kebijakan dan peningkatan kapasitas.
5. Meningkatkan kesejahteraan petani/kebun melalui dukungan kebijakan dan peningkatan kapasitas.

Tabel 6. Arah Kebijakan Jangka Menengah Perangkat Daerah

VISI	KALIMANTAN TENGAH MAKIN BERKAH		
MISI	MEMPERCEPAT PEMBANGUNAN EKONOMI YANG PRODUKTIF, KREATIF DAN BERWAWASAN LINGKUNGAN		
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
<p>Mewujudkan sektor perkebunan yang produktif bernilai tambah, berdaya saing, dan Berkelanjutan</p>	<p>Peningkatan produktivitas komoditas perkebunan. Peningkatan nilai tambah dan daya saing komoditas perkebunan Tercapainya Pengelolaan Perkebunan Berkelanjutan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fokus melaksanakan program intensifikasi dan peremajaan tanaman pada lahan yang tersedia untuk meningkatkan produktivitas komoditas perkebunan. 2. Mendorong pemanfaatan teknologi tepat guna dan standarisasi untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing komoditas perkebunan. 3. Memenuhi kekurangan ketersediaan sarana dan prasarana pembangunan perkebunan sesuai kebutuhan. 4. Meningkatkan kualitas kelembagaan dan tata kelola perkebunan melalui dukungan kebijakan dan peningkatan kapasitas. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mendorong peningkatan produksi dan produktivitas komoditas Perkebunan melalui intensifikasi budidaya usaha perkebunan secara berkelanjutan. 2. Penyebaran benih/bibit tanaman perkebunan bermutu dan bersertifikasi dengan memaksimalkan peran UPT pada Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah Unit Pelaksana Teknis Balai Perlindungan Perkebunan dan Pengawasan Benih ; serta Unit Pelaksana Teknis Balai Benih dan Kebun Produksi. 3. Program perlindungan tanaman perkebunan untuk mengendalikan penyebaran Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) pada tanaman perkebunan dan Dampak Perubahan Iklim pada lahan perkebunan. <ol style="list-style-type: none"> 1. Mendorong penggunaan teknologi tepat guna dalam penanganan pascapanenan pengolahan hasil perkebunan secara berkelanjutan. 2. Memfasilitasi pengembangan pemasaran produk perkebunan 3. Mendorong penerapan sertifikasi pengelolaan perkebunan dan standarisasi produk perkebunan. <ol style="list-style-type: none"> 1. Mendorong ketersediaan infrastruktur pembangunan perkebunan sesuai kebutuhan dengan terus menerus menjalin komunikasi dan bekerja sama dengan Perangkat Daerah yang terkait. 2. Melengkapi kekurangan sarana prasarana di Dinas Perkebunan dan UPT yang ada di bawahnya dalam rangka mempercepat pembangunan perkebunan. 3. Meningkatkan ketersediaan sarana budidaya dan pengolahan komoditas perkebunan sesuai kewenangan yang dimilikinya. <ol style="list-style-type: none"> 1. Mendorong dan memperkuat pemberdayaan kelembagaan di tingkat petani/pekebun/kelompok tani. 2. Mendorong dan memfasilitasi pola kemitraan petani/pekebun dengan semua 3. <i>stakeholders</i> yang terkait dalam sektor perkebunan. 4. Mengatur tata kelola pembangunan perkebunan yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan. 5. Meningkatkan kemampuan birokrasi Dinas Perkebunan dan UPT di bawahnya dalam melaksanakan pembangunan sektor perkebunan yang efektif dan efisien.

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
		Meningkatkan kualitas kelembagaan dan tata kelola perkebunan melalui dukungan kebijakan dan peningkatan kapasitas.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mendorong dan memperkuat pemberdayaan kelembagaan di tingkat petani/pekebun/kelompok tani. 2. Mendorong dan memfasilitasi pola kemitraan petani/pekebun dengan semua 3. <i>stakeholders</i> yang terkait dalam sektor perkebunan. 4. Mengatur tata kelola pembangunan perkebunan yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan. 5. Meningkatkan kemampuan birokrasi Dinas Perkebunan dan UPT di bawahnya dalam melaksanakan pembangunan sektor perkebunan yang efektif dan efisien.
		Meningkatkan kesejahteraan petani/kebun melalui dukungan kebijakan dan peningkatan kapasitas.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mendorong dan memfasilitasi peningkatan kapasitas petani/pekebun tentang standar mutu pengelolaan budi daya perkebunan dalam rangka meningkatkan mutu dan daya saing. 2. Mengatur perlindungan harga keekonomian komoditas perkebunan yang berkeadilan khususnya bagi petani/pekebun. 3. Menyediakan program peningkatan kapasitas petani/pekebun dalam peningkatan produktivitas melalui pelatihan dan penyuluhan. 4. Menyediakan bantuan sarana produksi perkebunan.

Sumber : RENSTRA Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah 2021-2026

2.3 Anggaran

Anggaran belanja pada Tahun 2024 nilai Anggaran Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah sebesar Rp. 41.220.679.910 terdiri dari Belanja Operasional Rp. 39.002.417.463 dan Belanja Modal Rp. 2.218.262.447

2.4. Penetapan Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024.

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target
1.	Peningkatan produktivitas komoditas perkebunan	1 Persentase laju pertumbuhan produksi komoditas perkebunan	%	0,16
		2 Persentase mediasi gangguan usaha perkebunan (GUP)	%	80
		3 Persentase penanganan organisme pengganggu tanaman (OPT)	%	80
2.	Peningkatan nilai tambah dan daya saing komoditas perkebunan	1 Jumlah unit pengolahan dan pemasaran bokar (UPPB)	Unit	55
		2 Persentase Peningkatan NTP sub sektor perkebunan	%	0,08
3.	Tercapainya pengelolaan perkebunan berkelanjutan	1 Persentase perusahaan perkebunan besar yang memperoleh sertifikasi Indonesia Sustainable Palm Oli (ISPO)	%	55
		2 Jumlah surat tanda daftar budidaya (STDB)	STDB	500
		3 Kontribusi sub sektor perkebunan terhadap PDRB(%)	%	14,00

2.5. PERJANJIAN KINERJA (PK) TAHUN 2024

Perjanjian Kinerja Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024, yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah dan Gubernur Kalimantan Tengah, terlampir.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja menggambarkan capaian kinerja sasaran dan Perjanjian Kinerja (PK) Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah. Perjanjian tersebut menjadi prasyarat untuk melakukan pengukuran kinerja dan merupakan target kinerja yang harus dicapai sebagai wujud komitmen dari pimpinan dan seluruh anggota organisasi. Selanjutnya dilakukan pengukuran kinerja yang merupakan perbandingan antara target kinerja (performance plan) yang telah ditetapkan dengan realisasinya (performance result).

Pada Tahun Anggaran 2024 Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah memiliki 3 sasaran strategis sesuai dengan Dokumen Renstra Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026, dan tertuang dalam Perjanjian Kinerja Tahun Anggaran 2020 adapun sasaran tersebut yaitu :

1. Peningkatan produktivitas komoditas perkebunan
2. Peningkatan nilai tambah dan daya saing komoditas
3. Tercapainya pengelolaan perkebunan berkelanjutan

3.1 Analisis Capaian Kinerja Tahun 2024

A. Pengukuran Kinerja

Pengukuran pencapaian kinerja Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2024 diukur berdasarkan perbandingan antara sasaran (target) serta realisasi masing–masing indikator kinerja dari 3 (tiga) sasaran strategis pada renstra. Pengukuran kinerja untuk sasaran strategis dapat dilihat dari tabel berikut :

Tabel 7. Capaian Kinerja Tahun 2024

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target
1.	Peningkatan produktivitas komoditas perkebunan	1.Persentase Laju Pertumbuhan Produksi Komoditas Perkebunan	Persen	0,16
		2.Persentase Mediasi Gangguan Usaha Perkebunan (GUP)	Persen	80
		3.Persentase penanganan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT)	Persen	80

2.	Peningkatan nilai tambah dan daya saing komoditas perkebunan	1. Jumlah Unit Pengolahan dan Pemasaran Bokar (UPPB)	Unit	55
		2. Persentase Peningkatan NTP sub Sektor Perkebunan	Persen	0,08
3.	Tercapainya Pengelolaan Perkebunan Berkelanjutan	1. Persentase Perusahaan Perkebunan Besar yang memperoleh sertifikasi Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO)	Persen	55
		2. Jumlah Surat Tanda Daftar Budidaya (STDB)	Lembar	500
		3. Kontribusi sub sektor perkebunan terhadap PDRB (%)	Persen	14,05

Penilaian Laporan Kinerja Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah diambil dari Renstra 2021 – 2026 seperti tabel diatas dimana 3 sasaran dan 8 indikator kinerja utama sebagai acuan untuk mencapai tujuan pembangunan perkebunan Kalimantan Tengah

3.2 Analisis Hasil Pengukuran Kinerja

Sasaran 1. Peningkatan produktivitas komoditas perkebunan

Tabel 8 : Indikator, Target dan Realisasi Sasaran 1

No	Sasaran	Indikator	Target			Realisasi			Ket
			2022	2023	2024	2022	2023	2024	
1.	Peningkatan produktivitas komoditas perkebunan	1. Persentase Laju Pertumbuhan Produksi Komoditas Perkebunan	0,12 %	0,14%	0,16%	1,20%	4,43%	1,06%	
		2. Persentase Mediasi Gangguan Usaha Perkebunan (GUP)	80 %	80%	80%	33%	23,25%	28,57%	
		3. Persentase penanganan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT)	70 %	75%	80%	33%	22,85%	9,27%	

Pada tabel 8 Indikator, Target dan Realisasi Sasaran peningkatan produktivitas komoditas perkebunan, yang terdiri dari 3 indikator yaitu :

- a. Persentase laju pertumbuhan produksi komoditas perkebunan,
- b. Persentase mediasi gangguan usaha perkebunan (GUP)
- c. Persentase penanganan organisme pengganggu tumbuhan (OPT).

- a. Persentase laju pertumbuhan produksi komoditas perkebunan

Cara penghitungan laju pertumbuhan adalah Jumlah produksi tahun 2024 dikurang dengan jumlah produksi tahun 2023 dibagi jumlah produksi tahun 2024.

$$\frac{\Sigma \text{Produksi 2024} - \Sigma \text{Produksi 2023}}{\Sigma \text{Produksi 2024}} \times 100$$

Komoditi perkebunan yang dikembangkan di Kalimantan Tengah antara lain, Kelapa Sawit, Karet, Kelapa, Kopi, Kakao, Cengkeh, dan Pinang,

Tabel 9. Rekapitulasi Produksi dan laju produksi komoditi unggulan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024.

No	Jenis Komoditi	Produksi		% Laju Produksi
		2023	2024	
1	Kelapa Sawit	1.110.868,3	1.052.198,19	-5,58
2	Karet	180.463,20	174.687,55	-3,31
3	Kelapa	16.651,40	16.668,26	0,10
4	Kopi	252,76	233,19	-8,39
5	Kakao	1.576,38	1.585,18	0,56

Ket : Data Statistik Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah 2023 (Angka Tetap)
Data Statistik Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah 2024 (Angka Sementara)

Pertumbuhan produksi komoditi perkebunan diangka 1,06% ditahun 2024 masih melampaui target kinerja yang telah ditetapkan yaitu 0,16 %. Penghitungan jumlah produksi pada tanaman perkebunan tidak bisa diseragamkan karena masing-masing tanaman memiliki satuan hasil akhir dan wujud yang berbeda contoh Kelapa Sawit dihitung jumlah produksinya setelah menjadi Crude Palm Oil (CPO), Karet dihitung dalam bentuk Karet kering dan lain – lain. Dari ke 5 (lima) komoditi utama tersebut diatas rata-rata menunjukkan penurunan laju produksi dikarenakan data yang digunakan untuk 2024 masih data sementara dimana pendataan yang dilakukan dikabupaten/Kota masih dalam tahap penghitungan menuju angka tetap 2024.

b. Persentase Mediasi Gangguan Usaha Perkebunan (GUP)

Tujuan adanya kegiatan mediasi gangguan usaha perkebunan antara lain melakukan inventarisasi dan identifikasi kondisi dan jenis gangguan usaha dan konflik perkebunan yang ada di 14 Kabupaten/Kota adalah membantu upaya dalam penyelesaian gangguan Usaha dan konflik perkebunan dan berkoordinasi dengan instansi terkait dalam rangka penanganan kasus gangguan usaha dan konflik perkebunan.

Adapun yang menjadi sasaran kegiatan Identifikasi dan Inventarisasi kasus Gangguan Usaha dan Konflik Perkebunan adalah teridentifikasinya dan terinventarisasinya Gangguan Usaha dan Konflik Perkebunan di 14 Kabupaten/kota.

Tabel.10 Data Rekapitulasi Gangguan Usaha dan Konflik Perkebunan di Kalimantan Tengah Periode Bulan Januari s/d Desember Tahun 2024

No	Kabupaten	Tipologi GUKP		Jumlah	Mediasi	Keterangan
		Lahan	Non Lahan			
1	2	3	4	5	6	7
1.	Murung Raya	-	-	-	-	Tidak Ada GUKP
2.	Barito Utara	-	-	-	-	Tidak Ada GUKP
3.	Barito Timur	3	-	3	-	1 surat dinas, 1 surat tembusan, 1 dalam proses
4.	Barito Selatan	-	-	-	-	Tidak Ada GUKP
5.	Kapuas	4	2	6	1	1 mediasi prov, 1 surat dinas, 2 monitor, 1 tembusan, 1 penanganan Pemkab
6.	Pulang Pisau	-	1	1	1	1 mediasi Prov.
7.	Palangka Raya	-	-	-	-	Tidak Ada GUKP
8.	Gunung Mas	-	1	1	-	Dalam proses
9.	Katingan	1	-	1	-	1 penanganan Pemkab
10.	Kotawaringin Timur	6	4	10	6	3 mediasi Prov, 2 monitor, 2 dalam proses, 1 penanganan Pemkab, 2 tembusan
11.	Seruyan	-	2	2	-	2 monitor
12.	Kotawaringin Barat	1	-	1	-	1 surat dinas
13.	Lamandau	-	-	-	-	Tidak Ada GUKP
14.	Sukamara	-	-	-	-	Tidak Ada GUKP
15.	Seruyan - Kotim	4	3	7	2	2 jalur hukum, 2 kasus lama, 2 dalam proses, 1 surat tembusan
16.	Sukamara -Kobar	-	-	-	-	Tidak Ada GUKP

No	Kabupaten	Tipologi GUKP		Jumlah	Mediasi	Keterangan
		Lahan	Non Lahan			
17.	Sukamara – Lamandau	1	-	1	-	1 dalam penanganan Pemkab
18.	Katingan – Kotim	1	1	2	-	1 penanganan Pemkab Katingan, 1 dalam proses.
Jumlah		21	14	35	10	

Ket : Sumber data Bidang Perlindungan Dinas Perkebunan Prov. Kal-Teng

Dari tabel 11 diatas ada 8 (delapan) kabupaten dan 2 wilayah lintas kabupaten yang terdata memiliki kasus gangguan usaha perkebunan di Tahun 2024, Gangguan Usaha Perkebunan ini dipilah menjadi 2 permasalahan yaitu :

1. Permasalahan Lahan = 21 Kasus
 2. Permasalahan Non Lahan = 14 Kasus
- Jumlah = 35 Kasus

$$\frac{\sum \text{kasus yang termediasi}}{\sum \text{kasus yang teridentifikasi}} \times 100$$

$$\frac{10}{35} \times 100 = 28,57 \%$$

Penurunan persentase penyelesaian dikarenakan jumlah kasus teridentifikasi lebih banyak dan masih dalam proses pengupayaan mediasi. Dalam pelaksanaan mediasi GUP persentase keberhasilan kegiatan mencapai 100 % yaitu dengan mempertemukan kedua pihak bermasalah dan pihak-pihak terkait dalam penyelesaian konflik yang terjadi.ada penurunan jumlah kabupaten yang melaporkan Gangguan usaha perkebunan dari 9 (sembilan) Kabupaten di Tahun 2023 menjadi 8 (delapan) Kabupaten di Tahun 2024. Jumlah kasus yang cukup tinggi merupakan akumulasi dari kasu-kasu di tahun sebelumnya yang belum termediasi dan terselesaikan

Kendala dalam melaksanakan mediasi ini antara lain :

1. Kurangnya ketersediaan anggaran menjadi salah satu kendala karena untuk mempertemukan dua belah pihak yang bermasalah memerlukan tempat dan kondisi yang nyaman.

2. Koordinasi dengan instansi, dan perangkat daerah terkait dalam hal menentukan waktu pertemuan yang harus mengikuti kondisi masing-masing stake holder.

c. Persentase penanganan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT)

Tujuan penanganan organisme pengganggu tumbuhan yaitu :

1. Meningkatkan kewaspadaan petani pekebun dalam melakukan pengendalian serangan OPT Tanaman Perkebunan sehingga dapat terdeteksi lebih dini dan dapat melakukan pengendalian secara mandiri.
2. Memberikan perlindungan teknis terhadap tanaman perkebunan dengan melakukan pembinaan kepada masyarakat/petani pemilik kebun

Indikator Persentase penanganan organisme pengganggu tanaman (OPT) selain bertujuan untuk mengetahui sebaran gangguan atau ancaman terhadap perkebunan rakyat juga untuk Menekan kehilangan hasil akibat serangan OPT untuk mempertahankan produksi kebun dan terwujudnya kemandirian masyarakat petani dalam penerapan Pengendalian Hama Terpadu (PHT) dan meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan kemampuan petani tentang PHT.

Tabel 11. Rekapitulasi Pemantauan Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Komoditi Perkebunan (Kelapa Sawit, Karet, Kelapa, Kopi, Kakao dan Lada) Tahun 2024

No	Kabupaten	Luas Serangan	Luas Pengendalian	Keterangan
1	Murung Raya	6,11	5,00	
2	Barito Utara	9,52	0	
3	Barito Timur	8,17	0	
4	Barito Selatan	0,43	0	
5	Gunung Mas	39,10	0	
6	Kapuas	2,02	0	
7	Pulang Pisau	38,60	0	
8	Katingan	0,05	0	
9	Kotawaringin Timur	6,68	0	
10	Lamandau	5,68	3,92	
11	Kotawaringin Barat	1,43	3,00	
12	Seruyan	1,04	0	
13	Sukamara	24,70	0,62	
14	Kota Palangka Raya	2,47	1	
	Jumlah	146,00	13,54	

Ket: Sumber data Bidang Perlindungan Perkebunan Dinas Perkebunan Prov. Kal-Teng, 2024

$$\frac{\text{Luas Pengendalian}}{\text{Luas Serangan}} \times 100$$

$$\frac{13,54}{146,00} \times 100 = 9,27 \%$$

Tabel tersebut diatas merupakan rekapitulasi pemantauan serangan OPT Komoditi Perkebunan (Kelapa Sawit, Karet, Kelapa, Kopi, Kakao dan Lada), dalam tabel tersebut Kabupaten Gunung Mas mengalami luas serangan OPT yang cukup besar sekitar 39,10 Ha dimana penyerangan paling besar pada komoditi karet yang disebabkan oleh Jamur Akar Putih, Gugur Daun dan Rayap. Tindak lanjut yang dilakukan oleh Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah terhadap hasil pemantauan tersebut adalah memberikan sosialisasi tata cara penanganan serangan OPT di daerah terserang. Pelaksanaan kegiatan tersebut memiliki keberhasilan 60-80% dimana kabupaten bisa menerapkan tata cara pengendalian OPT secara baik dan benar.

Kendala penanganan Organisme Pengganggu Tumbuhan antara lain:

1. Lambannya pelaporan dari petugas kabupaten untuk mengajukan pemeriksaan ke Dinas Perkebunan Provinsi, sehingga dalam penanganannya terlambat dan memberikan kerugian kepada pemilik lahan (petani pekebun)
2. Pembiayaan yang kurang mendukung, karena lokasi yang dikunjungi cukup jauh dari ibukota kabupaten

Sasaran 2

Peningkatan nilai tambah dan daya saing komoditas perkebunan

Tabel 12. Indikator, Target dan Realisasi Sasaran 2

No	Sasaran	Indikator	Target			Realisasi			Ket
			2022	2023	2024	2022	2023	2024	
1.	Peningkatan nilai tambah dan daya saing komoditas perkebunan	1. Jumlah Unit Pengolahan dan Pemasaran Bokar (UPPB)	51	53	55	51	56	56	
		2. Persentase peningkatan NTP Sub sektor Perkebunan	0,08	0,08	0,08	0,11	2,24	2,05	

a. Jumlah Unit Pengolahan Dan Pemasaran Bokar (UPPB)

Unit Pengolahan Dan Pemasaran Bokar (UPPB), dibentuk berdasarkan Permentan nomor 38 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengolahan dan Pemasaran Bahan Olah Karet (Bokar). Permentan ini lahir karena saat itu banyak keluhan pabrik crumb rubber bahwa bokar yang masuk kotor dicampur bahan lain sehingga dipabrik perlu biaya untuk membersihkan dan mengeringkan, proses pengolahan menjadi lebih lama. Produksi karet di Provinsi Kalimantan Tengah termasuk 7 besar tertinggi di Indonesia oleh karena itu Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah terus membina dan membimbing para pekebun karet untuk terus memacu produksi tanaman karetnya, termasuk mendorong para pekebun dalam membentuk UPPB. Keuntungan dari UPPB adalah untuk peningkatan mutu bokar, peningkatan harga bokar yang berujung pada peningkatan pendapatan petani. Berikut tabel rekapitulasi Unit Pengolahan dan Pemasaran Bokar Bersih (UPPB) se Kalimantan Tengah :

Tabel 13 : Rekapitulasi Unit Pengolahan dan Pemasaran Bokar Bersih (UPPB) se-Kalimantan Tengah Tahun 2024

No	Kabupaten	UPPB Teregister (Unit)		Jumlah	Keterangan
		Sudah	Belum		
1	Murung Raya	9	0	9	
2	Barito Utara	12	0	12	
3	Barito Timur	4	0	4	
4	Barito Selatan	2	1	3	
5	Gunung Mas				
6	Kapuas	11	0	11	
7	Pulang Pisau	8	0	8	
8	Katingan		1	1	
9	Kotawaringin Timur	2	0	2	
10	Lamandau	0	1	1	
11	Kotawaringin Barat	-	-	-	
12	Seruyan	3	0	3	
13	Sukamara	2	0	2	
14	Kota Palangka Raya	-	-	-	
	Jumlah	53	3	56	

Sumber : Bidang Pengolahan dan Pemasaran Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah, 2024

Tabel diatas menunjukkan total jumlah UPPB di Kalimantan Tengah sebanyak 56 Unit terdiri dari UPPB terregister sebanyak 53 Unit dan belum terregister 3 unit. Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah terus mengawal dan memberi bimbingan kepada UPPB yang belum teregistrasi agar bisa

melengkapi persyaratan yang diperlukan untuk mendapatkan registrasi. Tahun 2024 belum ada penambahan unit UPPB karena ditahun yang sama kegiatan untuk pendataan UPPB difokuskan pada kegiatan Sosialisasi ISPO di 14 Kab./Kota dari dana DBH Sawit.

b. Persentase peningkatan NTP Sub sektor Perkebunan

Nilai Tukar Petani (NTP) merupakan ukuran hubungan harga. **NTP** memberikan indikasi secara umum mengenai daya beli komoditas/produk pertanian terhadap barang dan jasa yang saat ini dibeli oleh petani baik untuk kebutuhan hidupnya sehari-hari maupun untuk biaya produksi dan penambahan barang modal. NTP Gabungan Kalimantan Tengah pada Desember 2023 sebesar 137,88 dan Desember Tahun 2024 mencapai 161,34 bisa dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 14. Nilai Tukar Petani (NTP) Subsektor Perkebunan (2018=100) Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2022-2024.

No	Bulan	Tahun (%)		
		2022	2023	2024
1	Januari	153,30	133,83	137,90
2	Februari	157,45	134,60	139,82
3	Maret	161,22	139,43	141,81
4	April	160,14	141,45	143,90
5	Mei	140,34	133,76	143,32
6	Juni	132,23	126,50	144,69
7	Juli	119,98	126,93	145,12
8	Agustus	128,38	129,19	146,53
9	September	129,32	128,88	147,34
10	Oktober	128,36	131,26	151,95
11	Nopember	131,14	134,86	159,05
12	Desember	131,29	137,88	161,34

Sumber : BPS Provinsi Kalimantan Tengah,

NTP merupakan ukuran hubungan harga. **NTP** memberikan indikasi secara umum mengenai daya beli komoditas/produk pertanian terhadap barang dan jasa yang saat ini dibeli oleh petani baik untuk kebutuhan hidupnya sehari-hari maupun untuk biaya produksi dan penambahan barang modal. NTP Gabungan Kalimantan Tengah pada Desember 2024 sektor Perkebunan sebesar 161,34 persen. (Data BPS 2025)

Sasaran 3

Tercapainya pengelolaan perkebunan berkelanjutan

Tabel 15. Indikator, Target dan Realisasi Sasaran 3

No	Sasaran	Indikator	Target			Realisasi			Ket
			2022	2023	2024	2022	2023	2024	
1.	Tercapainya pengelolaan perkebunan berkelanjutan	1.Persentase Perusahaan Perkebunan Besar yang memperoleh sertifikasi Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO)	50%	55%	55%	35%	34%	36,63%	
		2.Jumlah Surat Tanda Daftar Budidaya (STDB)	500	500	500	694	1.637	1.612	
		3.Kontribusi sub sektor perkebunan terhadap PDRB (%)	13,96	14,00	14,05	14,01	14,93	-	Belum ada data

a. Persentase perusahaan perkebunan besar yang memperoleh sertifikasi Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO).

Persentase perusahaan perkebunan besar yang memperoleh sertifikasi Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO). **Indonesian Sustainable Palm Oil System** (ISPO) adalah suatu kebijakan yang diambil oleh Pemerintah Indonesia dalam hal ini Kementerian Pertanian dengan tujuan untuk meningkatkan daya saing minyak sawit Indonesia di pasar dunia dan ikut berpartisipasi dalam rangka memenuhi komitmen Presiden Republik Indonesia untuk mengurangi gas rumah kaca serta memberi perhatian terhadap masalah lingkungan. ISPO dibentuk pada tahun 2009 oleh pemerintah Indonesia untuk memastikan bahwa semua pihak pengusaha kelapa sawit memenuhi standar pertanian yang diizinkan. Di Provinsi Kalimantan Tengah Perusahaan Besar Sawit Swasta yang telah mendapatkan ISPO berjumlah 67 Perusahaan.

Tabel 16. Rekapitulasi jumlah perusahaan swasta di Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024.

No	Perusahaan Perkebunan Besar Swasta	Jumlah (Unit)		Total
		Sudah Operasional	Belum Operasional	
1	Komoditi Sawit	202	91	293
2	Komoditi Karet	6	0	6
	Jumlah	208	98	299

Ket. Sumber data Bidang Pembinaan Usaha Pemberdayaan Kelembagaan dan Pengembangan Potensi Perkebunan (PUPKP3) Dinas Perkebunan Prov.Kal-Teng, Tahun 2023

$$\frac{\text{Jumlah PBS yang mendapatkan ISPO}}{\text{Jumlah PBS operasional}} \times 100$$

$$\frac{74}{202} \times 100 = 36,63\%$$

Jumlah perusahaan Besar Swasta Sawit di tahun 2024 yang sudah beroperasi dan belum operasional 36,63% ada peningkatan persentase jumlah Perusahaan Besar Swasta yang memiliki ISPO adalah sebagai tanda bukti bahwa telah adanya kesadaran dari pihak perusahaan swasta untuk melengkapi administrasi dalam menekuni bidang perkebunan.

1. Belum adanya tim audit daerah khususnya di Provinsi Kalimantan Tengah
2. Penilaian masih menggunakan pihak swasta
3. Alur administrasi yang cukup panjang, dll.

2. Jumlah Surat Tanda Daftar Budidaya (STDB)

Jumlah surat tanda daftar budidaya (STDB), **Surat Tanda Daftar Budidaya (STDB)** merupakan pendataan dan pendaftaran pekebun dengan luasan kurang dari 25ha oleh pemerintah untuk 137 komoditas perkebunan, termasuk sawit.

Proses penerbitan didahului dengan pendataan, verifikasi dan validasi lapangan atas lahan milik pekebun yang mengajukan permohonan. Tahun 2024 ada 4 (empat) kabupaten yang sudah menerbitkan sertifikat STDB yaitu Kabupaten Lamandau, Kabupaten Kotawaringin Barat, Kabupaten Katingan, dan Kabupaten Gunung Mas

Tabel 17. Rekapitulasi Realisasi Penerbitan STDB di Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024.

No	Kabupaten	Realisasi	Keterangan
1	Lamandau	616	
2	Kotawaringin Barat	810	
3	Katingan	138	
4	Gunung Mas	48	
5	Seruyan	284	
	Jumlah	1.896	

Ket : Sumber data Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah

Pada tabel tersebut diatas penyelesaian penerbitan STDB tahun 2024 sebanyak 1.896 dokumen STDB. Untuk Kabupaten sampai dengan laporan ini dibuat masih melakukan rekapitulasi dokumen STDB.

Kendala :

Sebagian besar lokasi kebun sawit masyarakat yang diusulkan mendapatkan STDB masih dalam kawasan hutan.

3. Kontribusi sub sektor perkebunan terhadap PDRB (%)

Kontribusi sub sektor perkebunan terhadap PDRB Kalimantan Tengah masih mengacu pada nilai Triwulan III yaitu sebesar (15,49%), PDRB pada dasarnya merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu daerah tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi untuk mengetahui nilai persentase tersebut Dinas Perkebunan mengikuti nilai yg diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kalimantan Tengah.

Tabel 18. Kontribusi PDRB Sub kategori Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah 2022-2023.

No	Periode	2022	2023	2024
1	Triwulan I	15,58	14,55	15,60
2	Triwulan II	14,32	14,37	16,01
3	Triwulan III	14,01	14,84	15,49
4	Triwulan IV	13,83	14,93	BAD

Ket : Sumber BPS Provinsi Kalimantan Tengah, Tahun 2025

*Belum ada data

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja menggambarkan capaian kinerja sasaran dan Perjanjian Kinerja (PK) Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah. Perjanjian tersebut menjadi prasyarat untuk melakukan pengukuran kinerja dan merupakan target kinerja yang harus dicapai sebagai wujud komitmen dari pimpinan dan seluruh anggota organisasi. Selanjutnya dilakukan pengukuran kinerja yang merupakan perbandingan antara target kinerja (performance plan) yang telah ditetapkan dengan realisasinya (performance result).

Pada Tahun Anggaran 2024 Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah memiliki 3 sasaran strategis sesuai dengan Dokumen Renstra Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026, dan tertuang dalam Perjanjian Kinerja Tahun Anggaran 2020 adapun sasaran tersebut yaitu :

1. Peningkatan produktivitas komoditas perkebunan
2. Peningkatan nilai tambah dan daya saing komoditas
3. Tercapainya pengelolaan perkebunan berkelanjutan

3.1 Analisis Capaian Kinerja Tahun 2024

A. Pengukuran Kinerja

Pengukuran pencapaian kinerja Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2024 diukur berdasarkan perbandingan antara sasaran (target) serta realisasi masing–masing indikator kinerja dari 3 (tiga) sasaran strategis pada renstra. Pengukuran kinerja untuk sasaran strategis dapat dilihat dari tabel berikut :

Tabel 7. Capaian Kinerja Tahun 2024

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target
1.	Peningkatan produktivitas komoditas perkebunan	1.Persentase Laju Pertumbuhan Produksi Komoditas Perkebunan	Persen	0,16
		2.Persentase Mediasi Gangguan Usaha Perkebunan (GUP)	Persen	80
		3.Persentase penanganan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT)	Persen	80

2.	Peningkatan nilai tambah dan daya saing komoditas perkebunan	1. Jumlah Unit Pengolahan dan Pemasaran Bokar (UPPB)	Unit	55
		2. Persentase Peningkatan NTP sub Sektor Perkebunan	Persen	0,08
3.	Tercapainya Pengelolaan Perkebunan Berkelanjutan	1. Persentase Perusahaan Perkebunan Besar yang memperoleh sertifikasi Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO)	Persen	55
		2. Jumlah Surat Tanda Daftar Budidaya (STDB)	Lembar	500
		3. Kontribusi sub sektor perkebunan terhadap PDRB (%)	Persen	14,05

Penilaian Laporan Kinerja Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah diambil dari Renstra 2021 – 2026 seperti tabel diatas dimana 3 sasaran dan 8 indikator kinerja utama sebagai acuan untuk mencapai tujuan pembangunan perkebunan Kalimantan Tengah

3.2 Analisis Hasil Pengukuran Kinerja

Sasaran 1. Peningkatan produktivitas komoditas perkebunan

Tabel 8 : Indikator, Target dan Realisasi Sasaran 1

No	Sasaran	Indikator	Target			Realisasi			Ket
			2022	2023	2024	2022	2023	2024	
1.	Peningkatan produktivitas komoditas perkebunan	1. Persentase Laju Pertumbuhan Produksi Komoditas Perkebunan	0,12 %	0,14%	0,16%	1,20%	4,43%	1,06%	
		2. Persentase Mediasi Gangguan Usaha Perkebunan (GUP)	80 %	80%	80%	33%	23,25%	28,57%	
		3. Persentase penanganan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT)	70 %	75%	80%	33%	22,85%	9,27%	

Pada tabel 8 Indikator, Target dan Realisasi Sasaran peningkatan produktivitas komoditas perkebunan, yang terdiri dari 3 indikator yaitu :

- a. Persentase laju pertumbuhan produksi komoditas perkebunan,
- b. Persentase mediasi gangguan usaha perkebunan (GUP)
- c. Persentase penanganan organisme pengganggu tumbuhan (OPT).

- a. Persentase laju pertumbuhan produksi komoditas perkebunan

Cara penghitungan laju pertumbuhan adalah Jumlah produksi tahun 2024 dikurang dengan jumlah produksi tahun 2023 dibagi jumlah produksi tahun 2024.

$$\frac{\Sigma \text{Produksi 2024} - \Sigma \text{Produksi 2023}}{\Sigma \text{Produksi 2024}} \times 100$$

Komoditi perkebunan yang dikembangkan di Kalimantan Tengah antara lain, Kelapa Sawit, Karet, Kelapa, Kopi, Kakao, Cengkeh, dan Pinang,

Tabel 9. Rekapitulasi Produksi dan laju produksi komoditi unggulan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024.

No	Jenis Komoditi	Produksi		% Laju Produksi
		2023	2024	
1	Kelapa Sawit	1.110.868,3	1.052.198,19	-5,58
2	Karet	180.463,20	174.687,55	-3,31
3	Kelapa	16.651,40	16.668,26	0,10
4	Kopi	252,76	233,19	-8,39
5	Kakao	1.576,38	1.585,18	0,56

Ket : Data Statistik Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah 2023 (Angka Tetap)
Data Statistik Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah 2024 (Angka Sementara)

Pertumbuhan produksi komoditi perkebunan diangka 1,06% ditahun 2024 masih melampaui target kinerja yang telah ditetapkan yaitu 0,16 %. Penghitungan jumlah produksi pada tanaman perkebunan tidak bisa diseragamkan karena masing-masing tanaman memiliki satuan hasil akhir dan wujud yang berbeda contoh Kelapa Sawit dihitung jumlah produksinya setelah menjadi Crude Palm Oil (CPO), Karet dihitung dalam bentuk Karet kering dan lain – lain. Dari ke 5 (lima) komoditi utama tersebut diatas rata-rata menunjukkan penurunan laju produksi dikarenakan data yang digunakan untuk 2024 masih data sementara dimana pendataan yang dilakukan dikabupaten/Kota masih dalam tahap penghitungan menuju angka tetap 2024.

b. Persentase Mediasi Gangguan Usaha Perkebunan (GUP)

Tujuan adanya kegiatan mediasi gangguan usaha perkebunan antara lain melakukan inventarisasi dan identifikasi kondisi dan jenis gangguan usaha dan konflik perkebunan yang ada di 14 Kabupaten/Kota adalah membantu upaya dalam penyelesaian gangguan Usaha dan konflik perkebunan dan berkoordinasi dengan instansi terkait dalam rangka penanganan kasus gangguan usaha dan konflik perkebunan.

Adapun yang menjadi sasaran kegiatan Identifikasi dan Inventarisasi kasus Gangguan Usaha dan Konflik Perkebunan adalah teridentifikasinya dan terinventarisasinya Gangguan Usaha dan Konflik Perkebunan di 14 Kabupaten/kota.

Tabel.10 Data Rekapitulasi Gangguan Usaha dan Konflik Perkebunan di Kalimantan Tengah Periode Bulan Januari s/d Desember Tahun 2024

No	Kabupaten	Tipologi GUKP		Jumlah	Mediasi	Keterangan
		Lahan	Non Lahan			
1	2	3	4	5	6	7
1.	Murung Raya	-	-	-	-	Tidak Ada GUKP
2.	Barito Utara	-	-	-	-	Tidak Ada GUKP
3.	Barito Timur	3	-	3	-	1 surat dinas, 1 surat tembusan, 1 dalam proses
4.	Barito Selatan	-	-	-	-	Tidak Ada GUKP
5.	Kapuas	4	2	6	1	1 mediasi prov, 1 surat dinas, 2 monitor, 1 tembusan, 1 penanganan Pemkab
6.	Pulang Pisau	-	1	1	1	1 mediasi Prov.
7.	Palangka Raya	-	-	-	-	Tidak Ada GUKP
8.	Gunung Mas	-	1	1	-	Dalam proses
9.	Katingan	1	-	1	-	1 penanganan Pemkab
10.	Kotawaringin Timur	6	4	10	6	3 mediasi Prov, 2 monitor, 2 dalam proses, 1 penanganan Pemkab, 2 tembusan
11.	Seruyan	-	2	2	-	2 monitor
12.	Kotawaringin Barat	1	-	1	-	1 surat dinas
13.	Lamandau	-	-	-	-	Tidak Ada GUKP
14.	Sukamara	-	-	-	-	Tidak Ada GUKP
15.	Seruyan - Kotim	4	3	7	2	2 jalur hukum, 2 kasus lama, 2 dalam proses, 1 surat tembusan
16.	Sukamara -Kobar	-	-	-	-	Tidak Ada GUKP

No	Kabupaten	Tipologi GUKP		Jumlah	Mediasi	Keterangan
		Lahan	Non Lahan			
17.	Sukamara – Lamandau	1	-	1	-	1 dalam penanganan Pemkab
18.	Katingan – Kotim	1	1	2	-	1 penanganan Pemkab Katingan, 1 dalam proses.
	Jumlah	21	14	35	10	

Ket : Sumber data Bidang Perlindungan Dinas Perkebunan Prov. Kal-Teng

Dari tabel 11 diatas ada 8 (delapan) kabupaten dan 2 wilayah lintas kabupaten yang terdata memiliki kasus gangguan usaha perkebunan di Tahun 2023, Gangguan Usaha Perkebunan ini dipilah menjadi 2 permasalahan yaitu :

1. Permasalahan Lahan = 21 Kasus
 2. Permasalahan Non Lahan = 14 Kasus
- Jumlah = 35 Kasus

$$\frac{\sum \text{kasus yang termediasi}}{\sum \text{kasus yang teridentifikasi}} \times 100$$

$$\frac{10}{35} \times 100 = 28,57 \%$$

Penurunan persentase penyelesaian dikarenakan jumlah kasus teridentifikasi lebih banyak dan masih dalam proses pengupayaan mediasi. Dalam pelaksanaan mediasi GUP persentase keberhasilan kegiatan mencapai 100 % yaitu dengan mempertemukan kedua pihak bermasalah dan pihak-pihak terkait dalam penyelesaian konflik yang terjadi.ada penurunan jumlah kabupaten yang melaporkan Gangguan usaha perkebunan dari 9 (sembilan) Kabupaten di Tahun 2023 menjadi 8 (delapan) Kabupaten di Tahun 2024. Jumlah kasus yang cukup tinggi merupakan akumulasi dari kasu-kasu di tahun sebelumnya yang belum termediasi dan terselesaikan

Kendala dalam melaksanakan mediasi ini antara lain :

1. Kurangnya ketersediaan anggaran menjadi salah satu kendala karena untuk mempertemukan dua belah pihak yang bermasalah memerlukan tempat dan kondisi yang nyaman.

2. Koordinasi dengan instansi, dan perangkat daerah terkait dalam hal menentukan waktu pertemuan yang harus mengikuti kondisi masing-masing stake holder.

c. Persentase penanganan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT)

Tujuan penanganan organisme pengganggu tumbuhan yaitu :

1. Meningkatkan kewaspadaan petani pekebun dalam melakukan pengendalian serangan OPT Tanaman Perkebunan sehingga dapat terdeteksi lebih dini dan dapat melakukan pengendalian secara mandiri.
2. Memberikan perlindungan teknis terhadap tanaman perkebunan dengan melakukan pembinaan kepada masyarakat/petani pemilik kebun

Indikator Persentase penanganan organisme pengganggu tanaman (OPT) selain bertujuan untuk mengetahui sebaran gangguan atau ancaman terhadap perkebunan rakyat juga untuk Menekan kehilangan hasil akibat serangan OPT untuk mempertahankan produksi kebun dan terwujudnya kemandirian masyarakat petani dalam penerapan Pengendalian Hama Terpadu (PHT) dan meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan kemampuan petani tentang PHT.

Tabel 11. Rekapitulasi Pemantauan Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Komoditi Perkebunan (Kelapa Sawit, Karet, Kelapa, Kopi, Kakao dan Lada) Tahun 2023

No	Kabupaten	Luas Serangan	Luas Pengendalian	Keterangan
1	Murung Raya	6,11	5,00	
2	Barito Utara	9,52	0	
3	Barito Timur	8,17	0	
4	Barito Selatan	0,43	0	
5	Gunung Mas	39,10	0	
6	Kapuas	2,02	0	
7	Pulang Pisau	38,60	0	
8	Katingan	0,05	0	
9	Kotawaringin Timur	6,68	0	
10	Lamandau	5,68	3,92	
11	Kotawaringin Barat	1,43	3,00	
12	Seruyan	1,04	0	
13	Sukamara	24,70	0,62	
14	Kota Palangka Raya	2,47	1	
	Jumlah	146,00	13,54	

Ket: Sumber data Bidang Perlindungan Perkebunan Dinas Perkebunan Prov. Kal-Teng, 2024

$$\frac{\text{Luas Pengendalian}}{\text{Luas Serangan}} \times 100$$

$$\frac{13,54}{146,00} \times 100 = 9,27 \%$$

Tabel tersebut diatas merupakan rekapitulasi pemantauan serangan OPT Komoditi Perkebunan (Kelapa Sawit, Karet, Kelapa, Kopi, Kakao dan Lada), dalam tabel tersebut Kabupaten Gunung Mas mengalami luas serangan OPT yang cukup besar sekitar 39,10 Ha dimana penyerangan paling besar pada komoditi karet yang disebabkan oleh Jamur Akar Putih, Gugur Daun dan Rayap. Tindak lanjut yang dilakukan oleh Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah terhadap hasil pemantauan tersebut adalah memberikan sosialisasi tata cara penanganan serangan OPT di daerah terserang. Pelaksanaan kegiatan tersebut memiliki keberhasilan 60-80% dimana kabupaten bisa menerapkan tata cara pengendalian OPT secara baik dan benar.

Kendala penanganan Organisme Pengganggu Tumbuhan antara lain:

1. Lambannya pelaporan dari petugas kabupaten untuk mengajukan pemeriksaan ke Dinas Perkebunan Provinsi, sehingga dalam penanganannya terlambat dan memberikan kerugian kepada pemilik lahan (petani pekebun)
2. Pembiayaan yang kurang mendukung, karena lokasi yang dikunjungi cukup jauh dari ibukota kabupaten

Sasaran 2

Peningkatan nilai tambah dan daya saing komoditas perkebunan

Tabel 12. Indikator, Target dan Realisasi Sasaran 2

No	Sasaran	Indikator	Target			Realisasi			Ket
			2022	2023	2024	2022	2023	2024	
1.	Peningkatan nilai tambah dan daya saing komoditas perkebunan	1. Jumlah Unit Pengolahan dan Pemasaran Bokar (UPPB)	51	53	55	51	56	56	
		2. Persentase peningkatan NTP Sub sektor Perkebunan	0,08	0,08	0,08	0,11	2,24	2,05	

a. Jumlah Unit Pengolahan Dan Pemasaran Bokar (UPPB)

Unit Pengolahan Dan Pemasaran Bokar (UPPB), dibentuk berdasarkan Permentan nomor 38 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengolahan dan Pemasaran Bahan Olah Karet (Bokar). Permentan ini lahir karena saat itu banyak keluhan pabrik crumb rubber bahwa bokar yang masuk kotor dicampur bahan lain sehingga dipabrik perlu biaya untuk membersihkan dan mengeringkan, proses pengolahan menjadi lebih lama. Produksi karet di Provinsi Kalimantan Tengah termasuk 7 besar tertinggi di Indonesia oleh karena itu Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah terus membina dan membimbing para pekebun karet untuk terus memacu produksi tanaman karetnya, termasuk mendorong para pekebun dalam membentuk UPPB. Keuntungan dari UPPB adalah untuk peningkatan mutu bokar, peningkatan harga bokar yang berujung pada peningkatan pendapatan petani. Berikut tabel rekapitulasi Unit Pengolahan dan Pemasaran Bokar Bersih (UPPB) se Kalimantan Tengah :

Tabel 13 : Rekapitulasi Unit Pengolahan dan Pemasaran Bokar Bersih (UPPB) se-Kalimantan Tengah Tahun 2024

No	Kabupaten	UPPB Teregister (Unit)		Jumlah	Keterangan
		Sudah	Belum		
1	Murung Raya	9	0	9	
2	Barito Utara	12	0	12	
3	Barito Timur	4	0	4	
4	Barito Selatan	2	1	3	
5	Gunung Mas				
6	Kapuas	11	0	11	
7	Pulang Pisau	8	0	8	
8	Katingan		1	1	
9	Kotawaringin Timur	2	0	2	
10	Lamandau	0	1	1	
11	Kotawaringin Barat	-	-	-	
12	Seruyan	3	0	3	
13	Sukamara	2	0	2	
14	Kota Palangka Raya	-	-	-	
	Jumlah	53	3	56	

Sumber : Bidang Pengolahan dan Pemasaran Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah, 2024

Tabel diatas menunjukkan total jumlah UPPB di Kalimantan Tengah sebanyak 56 Unit terdiri dari UPPB terregister sebanyak 53 Unit dan belum terregister 3 unit. Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah terus mengawal dan memberi bimbingan kepada UPPB yang belum teregistrasi agar bisa

melengkapi persyaratan yang diperlukan untuk mendapatkan registrasi. Tahun 2024 belum ada penambahan unit UPPB karena ditahun yang sama kegiatan untuk pendataan UPPB difokuskan pada kegiatan Sosialisasi ISPO di 14 Kab./Kota dari dana DBH Sawit.

b. Persentase peningkatan NTP Sub sektor Perkebunan

Nilai Tukar Petani (NTP) merupakan ukuran hubungan harga. **NTP** memberikan indikasi secara umum mengenai daya beli komoditas/produk pertanian terhadap barang dan jasa yang saat ini dibeli oleh petani baik untuk kebutuhan hidupnya sehari-hari maupun untuk biaya produksi dan penambahan barang modal. NTP Gabungan Kalimantan Tengah pada Desember 2023 sebesar 137,88 dan Desember Tahun 2024 mencapai 161,34 bisa dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 14. Nilai Tukar Petani (NTP) Subsektor Perkebunan (2018=100) Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2022-2024.

No	Bulan	Tahun (%)		
		2022	2023	2024
1	Januari	153,30	133,83	137,90
2	Februari	157,45	134,60	139,82
3	Maret	161,22	139,43	141,81
4	April	160,14	141,45	143,90
5	Mei	140,34	133,76	143,32
6	Juni	132,23	126,50	144,69
7	Juli	119,98	126,93	145,12
8	Agustus	128,38	129,19	146,53
9	September	129,32	128,88	147,34
10	Oktober	128,36	131,26	151,95
11	Nopember	131,14	134,86	159,05
12	Desember	131,29	137,88	161,34

Sumber : BPS Provinsi Kalimantan Tengah,

NTP merupakan ukuran hubungan harga. **NTP** memberikan indikasi secara umum mengenai daya beli komoditas/produk pertanian terhadap barang dan jasa yang saat ini dibeli oleh petani baik untuk kebutuhan hidupnya sehari-hari maupun untuk biaya produksi dan penambahan barang modal. NTP Gabungan Kalimantan Tengah pada Desember 2024 sektor Perkebunan sebesar 161,34 persen. (Data BPS 2025)

Sasaran 3

Tercapainya pengelolaan perkebunan berkelanjutan

Tabel 15. Indikator, Target dan Realisasi Sasaran 3

No	Sasaran	Indikator	Target			Realisasi			Ket
			2022	2023	2024	2022	2023	2024	
1.	Tercapainya pengelolaan perkebunan berkelanjutan	1.Persentase Perusahaan Perkebunan Besar yang memperoleh sertifikasi Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO)	50%	55%	55%	35%	34%	36,63%	
		2.Jumlah Surat Tanda Daftar Budidaya (STDB)	500	500	500	694	1.637	1.612	
		3.Kontribusi sub sektor perkebunan terhadap PDRB (%)	13,96	14,00	14,05	14,01	14,93	-	Belum ada data

a. Persentase perusahaan perkebunan besar yang memperoleh sertifikasi Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO).

Persentase perusahaan perkebunan besar yang memperoleh sertifikasi Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO). **Indonesian Sustainable Palm Oil System** (ISPO) adalah suatu kebijakan yang diambil oleh Pemerintah Indonesia dalam hal ini Kementerian Pertanian dengan tujuan untuk meningkatkan daya saing minyak sawit Indonesia di pasar dunia dan ikut berpartisipasi dalam rangka memenuhi komitmen Presiden Republik Indonesia untuk mengurangi gas rumah kaca serta memberi perhatian terhadap masalah lingkungan. ISPO dibentuk pada tahun 2009 oleh pemerintah Indonesia untuk memastikan bahwa semua pihak pengusaha kelapa sawit memenuhi standar pertanian yang diizinkan. Di Provinsi Kalimantan Tengah Perusahaan Besar Sawit Swasta yang telah mendapatkan ISPO berjumlah 67 Perusahaan.

Tabel 16. Rekapitulasi jumlah perusahaan swasta di Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024.

No	Perusahaan Perkebunan Besar Swasta	Jumlah (Unit)		Total
		Sudah Operasional	Belum Operasional	
1	Komoditi Sawit	202	91	293
2	Komoditi Karet	6	0	6
	Jumlah	208	98	299

Ket. Sumber data Bidang Pembinaan Usaha Pemberdayaan Kelembagaan dan Pengembangan Potensi Perkebunan (PUPKP3) Dinas Perkebunan Prov.Kal-Teng, Tahun 2023

$$\frac{\text{Jumlah PBS yang mendapatkan ISPO}}{\text{Jumlah PBS operasional}} \times 100$$

$$\frac{74}{202} \times 100 = 36,63\%$$

Jumlah perusahaan Besar Swasta Sawit di tahun 2024 yang sudah beroperasi dan belum operasional 36,63% ada peningkatan persentase jumlah Perusahaan Besar Swasta yang memiliki ISPO adalah sebagai tanda bukti bahwa telah adanya kesadaran dari pihak perusahaan swasta untuk melengkapi administrasi dalam menekuni bidang perkebunan.

1. Belum adanya tim audit daerah khususnya di Provinsi Kalimantan Tengah
2. Penilaian masih menggunakan pihak swasta
3. Alur administrasi yang cukup panjang, dll.

2. Jumlah Surat Tanda Daftar Budidaya (STDB)

Jumlah surat tanda daftar budidaya (STDB), **Surat Tanda Daftar Budidaya (STDB)** merupakan pendataan dan pendaftaran pekebun dengan luasan kurang dari 25ha oleh pemerintah untuk 137 komoditas perkebunan, termasuk sawit.

Proses penerbitan didahului dengan pendataan, verifikasi dan validasi lapangan atas lahan milik pekebun yang mengajukan permohonan. Tahun 2024 ada 4 (empat) kabupaten yang sudah menerbitkan sertifikat STDB yaitu Kabupaten Lamandau, Kabupaten Kotawaringin Barat, Kabupaten Katingan, dan Kabupaten Gunung Mas

Tabel 17. Rekapitulasi Realisasi Penerbitan STDB di Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024.

No	Kabupaten	Realisasi	Keterangan
1	Lamandau	616	
2	Kotawaringin Barat	810	
3	Katingan	138	
4	Gunung Mas	48	
5	Seruyan	284	
	Jumlah	1.896	

Ket : Sumber data Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah

Pada tabel tersebut diatas penyelesaian penerbitan STDB tahun 2024 sebanyak 1.896 dokumen STDB. Untuk Kabupaten sampai dengan laporan ini dibuat masih melakukan rekapitulasi dokumen STDB.

Kendala :

Sebagian besar lokasi kebun sawit masyarakat yang diusulkan mendapatkan STDB masih dalam kawasan hutan.

3. Kontribusi sub sektor perkebunan terhadap PDRB (%)

Kontribusi sub sektor perkebunan terhadap PDRB Kalimantan Tengah masih mengacu pada nilai Triwulan III yaitu sebesar (15,49%), PDRB pada dasarnya merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu daerah tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi untuk mengetahui nilai persentase tersebut Dinas Perkebunan mengikuti nilai yg diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kalimantan Tengah.

Tabel 18. Kontribusi PDRB Sub kategori Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah 2022-2024.

No	Periode	2022	2023	2024
1	Triwulan I	15,58	14,55	15,60
2	Triwulan II	14,32	14,37	16,01
3	Triwulan III	14,01	14,84	15,49
4	Triwulan IV	13,83	14,93	BAD

Ket : Sumber BPS Provinsi Kalimantan Tengah, Tahun 2025

*Belum ada data

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan dan Saran

A. Kesimpulan

Tahun 2024 adalah penilaian Laporan Kinerja Penyelenggaraan yang mengacu pada Renstra Tahun 2021-2026 di tahun ke empat, yang terdiri dari 3 (tiga) sasaran dan 6 (enam) indikator

Secara umum tujuan, program atau sasaran satuan kerja Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024 telah berjalan dengan baik meskipun masih ditemui sejumlah hambatan atau kendala dalam pelaksanaannya. Hasil yang telah dicapai di tahun 2024 tentunya masih perlu ditingkatkan lagi ditahun-tahun mendatang.

Keberhasilan atas pencapaian target dari kegiatan atau sasaran yang ditetapkan atas kerjasama dan partisipasi semua pihak yang diharapkan dapat terus ditingkatkan sampai dengan terpenuhinya target-target yang menjadi acuan keberhasilan pembangunan perkebunan pembangunan yang berkelanjutan.

B. Saran

1. Diharapkan anggaran pemerintah daerah provinsi terus mendukung program/kegiatan yang tujuannya mensejahterakan petani pekebun.
2. Koordinasi baik dengan pihak Kabupaten/Kota guna menunjang keberhasilan program/kegiatan perkebunan ke depan.